

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 *Signaling Theory*

Penelitian ini menggunakan teori sinyal (*signaling theory*) sebagai teori penelitian. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3 yang berjudul *Job Market Signaling*. Spence (1973) menjelaskan bahwa pihak pemberi informasi dapat memberikan sinyal kepada pihak penerima informasi dengan menunjukkan kualitasnya. Dalam jurnalnya, Spence berfokus bagaimana citra pencari kerja (pendidikan, pekerjaan sebelumnya, ras, jenis kelamin, catatan kriminal dan dinas, dan sejumlah data lainnya) dapat memberikan sinyal kepada perusahaan dalam mempertimbangkan perekrutan pencari kerja tersebut.

Dalam buku *Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes*, Spence (1974) berpendapat bahwa “*market signal* adalah aktivitas atau atribut individu di pasar yang, secara sengaja atau tidak, mengubah keyakinan atau menyampaikan informasi kepada individu lain di pasar”. Teori ini terus berkembang dan digunakan oleh masyarakat. Menurut Ghazali (2020) “teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk mempengaruhi penerima sinyal. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuai dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perusahaan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*informasi content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan”.

“Nilai profitabilitas yang semakin meningkat memberikan arti bahwa nilai laba juga meningkat. Tingginya laba dapat dianggap sebagai suatu sinyal yang baik yang mengindikasikan bahwa perusahaan akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan mampu memenuhi kepentingan investor” (T.

Nainggolan & Wahyudi, 2023). Selain itu, “teori ini juga menjelaskan tentang alasan mengapa perusahaan memberikan informasi tentang laporan keuangan dan non keuangan suatu perusahaan kepada pihak eksternal yaitu pemegang saham, yang berguna untuk mengurangi perolehan informasi yang tidak akurat mengenai perusahaan dengan *stakeholder* yang pada umumnya sebagai pengguna informasi” (Aryani & Fitria, 2020).

Menurut Megginson (1996) dalam Ghozali (2020) “terdapat setidaknya empat pilar utama model sinyal yang dikenal dalam literatur keuangan. Keempat model dimaksud adalah (1) Model sinyal berbasis masa jatuh temponya utang (*signaling models of debt maturity choice*), (2) Model sinyal berbasis investasi korporasi (*signaling models of corporate investment*), (3) Model sinyal struktur keuangan (*signaling models of financial structure*), dan (4) Model sinyal dividen (*dividend signaling model*).”

“Model sinyal dividen didasarkan pada asumsi bahwa dividen perlu dibagikan dalam rangka untuk memberikan sinyal tentang adanya informasi positif (prospek bagus) perusahaan dari pihak internal (manajer) yang diyakini memiliki kelebihan informasi kepada pemegang saham di pasar yang dicirikan oleh adanya ketimpangan informasi. Bagi perusahaan, pembagian dividen tunai merupakan bentuk pengorbanan manajemen (perusahaan), sebenarnya bila perusahaan memerlukan dana untuk pengembangan (investasi), laba yang diperoleh tidak harus dalam jumlah besar dibagikan kepada pemegang saham. Perusahaan kecil tidak memiliki dorongan untuk meniru perusahaan besar dengan membagi dividen karena memang secara finansial masih belum memungkinkan” (Ghozali, 2020).

Menurut Sejati et al. (2020) “teori ini sangat berkaitan dengan kebijakan dividen, informasi sangat penting bagi investor untuk mengetahui kondisi perusahaan, informasi tentang keputusan perusahaan merupakan *signal* atau kondisi terhadap keadaan perusahaan itu. Data serta informasi sangat penting buat investor memperhitungkan prospek kinerja perusahaan, dan untuk jadi pertimbangan investor dalam menginvestasikan dananya. Apabila pengumuman yang menyatakan bahwa suatu perusahaan telah memutuskan

untuk menaikkan dividen per saham dapat diartikan oleh investor sebagai berita atau sinyal yang baik, karena dividen per saham yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yakin arus kas pada masa mendatang akan cukup besar untuk menanggung tingkat dividen yang tinggi”.

### 2.1.2 Kebijakan Dividen

“Pasar modal mengharuskan suatu perusahaan untuk lebih meningkatkan citra mereka, peningkatan citra perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengumumkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba dan membagikan dividen kepada para pemegang saham” (Haya & Riduwan, 2024).

“*A dividend is a corporation’s distribution of cash or shares to its shareholders on a pro rata (proportional to ownership) basis*, yang berarti dividen adalah pembagian kas atau saham perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam basis yang pro rata (proporsional dengan kepemilikan)” (Weygandt et al., 2022).

“Dividen mengurangi saldo laba perusahaan. Dividen bukanlah termasuk ke dalam biaya. Perusahaan akan menentukan apa saja yang menjadi pendapatan dan biaya terlebih dahulu lalu menghitung laba bersih atau rugi bersih. Jika perusahaan memiliki laba bersih, dan memutuskan untuk tidak menggunakan laba tersebut, maka memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemiliknya (pemegang saham)” (Weygandt et al., 2022).

Menurut Kieso et al., (2020) terdapat 4 (empat) jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan, yaitu:

#### 1. *Cash dividend*

“Dewan direksi memberikan suara pada pengumuman dividen tunai. Setelah keputusan disetujui, dewan direksi mengumumkan dividen. Namun, sebelum membayarnya, perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham terkini. Oleh karena itu, biasanya ada jeda waktu antara pengumuman dan pembayaran. Dividen tunai yang dideklarasikan merupakan kewajiban. Karena pembayaran umumnya diperlukan segera, biasanya merupakan kewajiban lancar. Perusahaan tidak mengumumkan

atau membayar dividen tunai atas saham treasury karena saham tersebut tidak beredar”.

2. *Property dividend*

“Dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan selain uang tunai disebut dividen properti atau dividen dalam bentuk barang. Dividen properti dapat berupa barang dagangan, real estat, atau investasi, atau bentuk apa pun yang ditetapkan oleh dewan direksi. Saat mendeklarasikan dividen properti, perusahaan harus mengukur ulang properti yang akan didistribusikan pada nilai wajar, dengan mengakui keuntungan atau kerugian sebagai selisih antara nilai wajar properti dan nilai tercatat pada tanggal deklarasi”.

3. *Liquidating dividend*

“*Liquidating dividend* adalah dividen yang didasarkan pada selain laba ditahan. Dividen tersebut merupakan pengembalian investasi pemegang saham dan bukan laba. Dengan kata lain, dividen apa pun yang tidak didasarkan pada laba mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham adalah dividen likuidasi”.

4. *Share dividend*

“Dividen saham adalah penerbitan sahamnya sendiri oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya secara pro rata, tanpa menerima imbalan apa pun. Dalam mencatat dividen saham, beberapa orang percaya bahwa perusahaan harus mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan ke modal saham”.

Menurut Marota et al., (2021) “untuk membayar dividen kas perusahaan harus memenuhi kondisi berikut”:

1. “Jumlah saldo laba (*retained earnings*) yang memadai”
2. “Jumlah kas yang memadai”
3. “Tindakan formal yang dilakukan oleh dewan direksi”.

“Sebelum dividen dibagikan, perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Jika perusahaan memilih untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai/kas, artinya perusahaan memiliki kas

dalam jumlah yang cukup” (Dewi et al., 2022). Menurut Wijayanti (2022), “dalam pembagian dividen, ada beberapa tanggal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang saham atau investor. Tanggal ini biasa disebut saat pengumuman pembagian dividen. Berikut merupakan tanggal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang saham atau investor”:

1. *Cum date (cumulative date)*

“*Cummulative date* merupakan tanggal terakhir seorang investor saham berhak mendapatkan dividen atas kepemilikan suatu saham.”

2. *Ex date (expired date)*

“*Expired date* merupakan tanggal ketika investor saham tidak lagi berhak mendapatkan dividen.”

3. *Recording date*

“*Recording date* merupakan tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.”

4. *Payment date*

“*Payment date* merupakan tanggal pembayaran dividen tersebut”.

Menurut Weygandt et al., (2022), “terdapat tiga tanggal penting yang berhubungan dengan dividen untuk dilakukan pencatatan, yaitu:”

1. *The declaration date*

“Pada tanggal pengumuman, direksi secara resmi mengumumkan (mengesahkan) dividen tunai tersebut dan mengumumkannya kepada pemegang saham. Pengumuman dividen tunai membuat perusahaan terikat pada kewajiban hukum. Perusahaan harus membuat jurnal untuk mengakui kenaikan *cash dividend* dan kenaikan *dividend payable*, sebagai berikut:”

		<i>Retained Earnings (Cash Dividends Declared)</i>	xxx
		<i>Dividend Payable</i>	xxx

2. *The record date*

“Pada tanggal pencatatan, perusahaan menentukan kepemilikan saham beredar untuk keperluan dividen. Catatan pemegang saham yang dikelola

oleh perusahaan menyediakan informasi ini. Dalam selang waktu antara tanggal deklarasi dan tanggal pencatatan, perusahaan memperbarui catatan kepemilikan sahamnya. Jurnal yang dibuat sebagai berikut:”

|| *No Entry*

### 3. *The payment date*

“Pada tanggal pembayaran, perusahaan mencatat pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham dan mencatat pembayaran dividen tersebut. Jurnal sebagai berikut:”

|| *Dividend Payable*      xxx  
*Cash*                              xxx

Menurut Juliana (2015) dalam Gunawan & Harjanto (2020), “dalam keputusan membagikan dividen, perusahaan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaannya. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan”. Menurut Wiagustini (2010:255) dalam Mayanti et.al. (2021), “kebijakan dividen merupakan keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan setelah perusahaan beroperasi dan memperoleh laba. Salah satu cara investor untuk menilai kinerja perusahaan adalah dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan”.

Menurut Firmansyah et al., (2020), “kebijakan dividen penting bagi manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau sebagian dibagikan untuk dividen, kemudian sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan”. “Keputusan pembagian dividen juga akan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan memenuhi harapan dari para pemegang saham. Dengan stabilnya pembagian dividen serta meningkatnya dividen yang dibagikan akan mampu meningkatkan kepercayaan dari para pemegang saham” (Tehresia et al., 2023).

*“Dividend policies vary among corporations. Some companies take pride in a long, unbroken string of quarterly dividend payments. They would lower or*

*pass the dividend only if forced to do so by a sustained decline in earnings or a critical shortage of cash*". Pernyataan ini berarti "kebijakan dividen bervariasi antar perusahaan. Beberapa perusahaan bangga dengan rangkaian pembayaran dividen triwulanan yang panjang dan tidak terputus. Mereka akan menurunkan atau membagikan dividen hanya jika terpaksa melakukannya karena penurunan pendapatan yang berkelanjutan atau kekurangan uang tunai" (Kieso et al., 2020).

Pengukuran kebijakan dividen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *dividend payout ratio (DPR)*. Menurut Sudanan (2015,26) dalam Deitiana et al. (2021), "*dividend payout ratio* yaitu indikator dari kebijakan dividen suatu perusahaan yang dapat menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan berupa dividen tunai. *Dividend payout ratio rasio* ini mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham, semakin besar rasio ini berarti semakin sedikit bagian laba yang ditahan untuk membiayai investasi yang dilakukan perusahaan". Menurut Weygandt et al. (2022), "*payout ratio* mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi umumnya memiliki rasio pembayaran yang rendah karena mereka menginvestasikan kembali sebagian besar laba bersihnya ke dalam bisnis". Menurut Zutter & Smart (2021), berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen:

1. "*Legal Constraints (Pembatasan Hukum)*"

"Negara terkadang memberlakukan persyaratan pendapatan yang membatasi jumlah dividen. Dengan pembatasan ini, perusahaan tidak dapat membayar dividen tunai lebih dari jumlah laba ditahan terkini dan masa lalu. Namun, perusahaan tidak dilarang membayar dividen lebih dari pendapatannya saat ini. Jika suatu perusahaan mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo atau secara hukum bangkrut atau bangkrut, sebagian besar negara bagian melarang perusahaan tersebut membayar dividen tunai". Di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas (2007) pada pasal 71 ayat (3) yang menyatakan bahwa “dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif”.

2. *“Contractual Constraints”*

“Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai dibatasi oleh ketentuan yang membatasi dalam perjanjian pinjaman. Umumnya, batasan ini melarang pembayaran dividen tunai sampai perusahaan mencapai tingkat pendapatan tertentu, atau membatasi dividen hingga jumlah dolar atau persentase pendapatan tertentu. Pembatasan dividen membantu melindungi kreditor dari kerugian akibat kebangkrutan perusahaan”.

3. *“Growth Prospect”*

“Kebijakan dividen dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki akses yang memadai terhadap modal baru, sedangkan perusahaan yang berkembang mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung proyek-proyek yang dapat diterima. Perusahaan yang sedang berkembang kemungkinan besar harus sangat bergantung pada pendanaan internal melalui laba ditahan, sehingga kemungkinan besar perusahaan tersebut hanya membayar sebagian kecil dari pendapatannya sebagai dividen. Perusahaan yang lebih mapan mempunyai posisi yang lebih baik untuk membayar sebagian besar pendapatannya, terutama jika perusahaan tersebut mempunyai sumber pendanaan yang siap.”

4. *“Owner Consideration”*

Pada faktor ini, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemilik terkait kebijakan dividen perusahaan, yaitu:

a. *Tax Status of a firm’s owner*

“Ketika persentase pemegang saham yang berpendapatan tinggi dalam suatu perusahaan besar, maka perusahaan tersebut mungkin memutuskan untuk membayar dengan persentase yang lebih rendah dari pendapatannya agar pemilik dapat menunda pembayaran pajak

sampai mereka menjual sahamnya. Sedangkan, pemegang saham yang membutuhkan uang akan memilih dividen dengan jumlah yang besar”.

b. *Owners' investment opportunities*

“Jika peluang investasi perusahaan memberikan *return* yang rendah, maka perusahaan akan lebih memilih untuk memperbesar pembagian laba yang diperoleh kepada pemilik (pemegang saham). Namun, jika peluang investasi perusahaan memberikan *return* yang besar, maka perusahaan akan memilih untuk menggunakan laba tersebut untuk diinvestasikan kembali”.

c. *“Investment directive of certain types of institutional investors.”*

“Penelitian telah membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan lebih tinggi oleh investor institusi akan membayar dividen lebih tinggi. Ada beberapa bukti bahwa lembaga-lembaga ini menekan manajer untuk meningkatkan dividen, terutama dalam kasus di mana manajer memiliki kelebihan arus kas untuk berinvestasi namun peluang investasi yang menguntungkan terbatas.”

d. *“Potential dilution of ownership”*

“Jika perusahaan membayar persentase pendapatan yang tinggi, perusahaan mungkin harus meningkatkan modal ekuitas baru dengan menjual saham biasa. Hasil dari penerbitan saham baru dapat berupa dilusi kontrol dan pendapatan bagi pemilik lama. Dengan membayar persentase yang rendah dari pendapatannya, perusahaan dapat meminimalkan kemungkinan dilusi tersebut.”

5. *“Market Consideration”*

“Permintaan investor terhadap dividen berfluktuasi seiring waktu. Ketika perekonomian berada dalam resesi dan pasar saham jatuh, investor mungkin lebih memilih keamanan dividen. *Catering theory* menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung melakukan pembayaran dividen, atau meningkatkan pembayaran yang sudah ada, ketika investor menunjukkan

preferensi yang kuat terhadap dividen. Perusahaan memenuhi preferensi investor.”

“Besarnya kecilnya dividen berdasarkan rasio pembayaran dividen atau *Dividend Payout Ratio (DPR)* yang dibagikan kepada pemegang saham, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (Mutiarahim, 2020). “Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka akan semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh investor. Kinerja ini diartikan sebagai kemampuan kerja dari mesin atau perangkat kerja tersebut. Mulai dari penentuan struktur modal perusahaan, cara perolehan, pendistribusian atau penggunaan yang paling optimal sampai pengembalian modal tersebut kepada para pemegang saham” (Mutiarahim, 2020). “Jika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang diestimasikan dapat diperoleh pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat” (Tjhoa, 2020). “Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi umumnya memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah karena mereka menginvestasikan sebagian besar dari laba bersihnya ke dalam bisnis” (Weygandt et al., 2022). Berikut merupakan rumus *DPR* menurut Zutter & Smart (2021):

$$DPR = \frac{\text{Dividend per Share}}{\text{Earnings per Share}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

*Dividend Payout Ratio* : Rasio pembayaran dividen

*Dividend per Share* : Dividen per lembar saham

*Earnings per Share* : Laba per lembar saham

Menurut Hutami (2009) dalam Purnama & Nur (2020), “berikut merupakan rumus dari *dividend per share*:”

$$\text{Dividend per Share} = \frac{\text{Total Cash Dividends}}{\text{Total Outstanding Shares}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

*Dividend per Share* : Dividen per lembar saham

*Total Cash Dividends* : Total dividen tunai

*Total Outstanding Shares* : Total saham beredar

Yusdianto (2022) menyatakan bahwa “apabila yang diberikan adalah dividen kas, maka pemegang saham memperoleh laba yang dibagikan per lembar saham atau *dividen per share* atas kepemilikan yang mereka miliki”. Menurut Lilianti (2018) dalam Tri Humaerah et al. (2022), “*dividend per share is a distribution of profits that are distributed to all shareholders according to the total shares they own*” yang berarti “dividen per saham merupakan pembagian keuntungan yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya”. “*Dividend per share (DPS)* merupakan total semua dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar” (Purnama & Nur, 2020).

“*Earnings per share (EPS) is a measure of the net income earned on each ordinary share. It is computed by dividing net income available to ordinary shareholders by the number of weighted-average ordinary shares outstanding during the year.*” yang memiliki arti “*Earnings per share (EPS)* adalah ukuran laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa. *EPS* dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan” (Weygandt et al., 2022). Berikut merupakan rumus *EPS* menurut Weygandt et al., (2022):

$$EPS = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Weighted - Average Ordinary Share Outstanding}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

*Earnings per Share* : Laba per saham biasa

*Net Income* : Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

*Preference Dividends* : Dividen untuk pemegang saham preferen

*Weighted-Average Ordinary Share Outstanding* : Rata-rata tertimbang saham biasa beredar

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 233 tentang Laba per saham (2025) menyatakan bahwa “laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (pembilang) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (penyebut) dalam suatu periode. Tujuan dari informasi laba per saham adalah menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan. Entitas menyajikan laba per saham dasar dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain”

“Untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan:

- a. Laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas dan
- b. Laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk;

Jumlah pada huruf (a) dan (b) merupakan jumlah setelah disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak, selisih yang timbul dari penyelesaian saham preferen, dan akibat lain yang serupa dari saham preferen yang serupa dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas” PSAK 233 Laba per Saham (IAI, 2025).

### **2.1.3 Free Cash Flow**

Menurut IAI (2025) dalam PSAK No 207 Laporan Arus Kas, “berikut manfaat informasi arus kas:”

1. “Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, maka laporan arus kas dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuannya untuk memengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai entitas”.

2. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti ketepatan dari penilaian masa lalu atau arus kas masa depan dan dalam menguji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga”.

Selain itu menurut IAI (2025) dalam PSAK 207 Laporan Arus Kas, “laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut:”

1. Aktivitas Operasi

“Aktivitas operasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Informasi tentang komponen spesifik atas arus kas operasi historis adalah berguna, dalam hubungannya dengan informasi lain, dalam memprakirakan arus kas operasi masa depan”.

“Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
- b. penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
- c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- d. pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
- e. penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;

- f. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi; dan
- g. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan.”

## 2. Aktivitas Investasi

“Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka Panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.

Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah”:

- a. “pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;”
- b. “penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain;”
- c. “pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan);”
- d. “penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan);”
- e. “uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan);”

- f. “penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);”
  - g. “pembayaran kas untuk *future contracts, forward contracts, option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan”
  - h. “penerimaan kas dari *future contracts, forward contracts, option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan”.
3. Aktivitas Pendanaan

“Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah”:

- a. “penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;”
- b. “pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas;”
- c. “penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;”
- d. “pelunasan pinjaman; dan”
- e. “pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa.”

“*Successful mature companies frequently generate lots of cash—often exceeding their immediate needs. This excess cash is often referred to as free cash flow*”. Artinya adalah “perusahaan-perusahaan yang sukses sering kali

menghasilkan banyak uang dan melebihi kebutuhan mendesak mereka. Kelebihan kas ini sering disebut sebagai *free cash flow*” (Weygandt et al., 2022). Menurut Ross et al. (2021), “ arus kas bebas merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham, yang tidak diperlukan untuk modal kerja”. “Perusahaan yang memiliki arus kas bebas mampu mendanai pertumbuhan dan akuisisi, melunasi utang, membeli saham treasury, dan membayar dividen. Sedangkan, perusahaan yang tidak memiliki arus kas bebas mungkin memiliki fleksibilitas keuangan yang terbatas, yang berpotensi menyebabkan masalah likuiditas” (Warren et al., 2020).

*“A company with significant free cash flow must decide what to do with this cash. If it doesn’t want to expand its capacity in its existing product lines, it might decide to acquire businesses in other industries. Or, it might increase its dividend payments, buy back shares, or pay down its debt”*. Pernyataan ini memiliki arti “perusahaan dengan arus kas bebas yang signifikan harus memutuskan apa yang harus mereka lakukan dengan uang tunai tersebut. Jika perusahaan tidak ingin memperluas kapasitasnya pada lini produk yang ada, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengakuisisi bisnis di industri lain. Atau, perusahaan mungkin meningkatkan pembayaran dividen, membeli kembali saham, atau membayar utangnya” (Weygandt et al., 2022).

Menurut Fadilla & Aryani (2019) dalam Rambe (2020), “ arus kas bebas memperhatikan secara khusus pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi setelah digunakan untuk kebutuhan reinvestasi”. Selain itu, Putri & NR (2023) menyatakan bahwa “perusahaan dengan tingkat arus kas bebas yang tinggi dan pengawasan yang baik memungkinkan perusahaan untuk bertahan lebih baik dalam situasi yang buruk, tetapi sebaliknya dapat terjadi dengan tingkat surplus arus kas yang tinggi tanpa tingkat pengawasan yang memadai, hal ini dikarenakan pengelola atau manajemen tidak menggunakan kas yang tersedia dengan baik dan untuk tujuan investasi demi keuntungan pribadi”. Berikut merupakan rumus *free cash flow* menurut Warren et al., (2020):

$$FCF = \text{Cash Flows from Operating Activities} - \text{Cash used to purchase PPE} \quad (2.4)$$

Keterangan:

<i>FCF</i>	: Arus kas bebas
<i>Operating Cash Flow</i>	: Arus kas dari aktivitas operasi
<i>Cash used to purchase PPE</i>	: Kas yang digunakan untuk membeli <i>PPE</i> ( <i>property, plant and equipment</i> )

“A positive free cash-flow amount is often a precursor to increased earnings. A negative amount indicates that the company found or will find it necessary to acquire funds from external financing sources to maintain operations or to grow”. Pernyataan tersebut berarti “jumlah *free cash-flow* yang positif sering kali merupakan awal dari peningkatan pendapatan. Jumlah negatif menunjukkan bahwa perusahaan merasa atau akan merasa perlu memperoleh dana dari sumber pendanaan eksternal untuk mempertahankan operasi atau untuk tumbuh” (Schroeder et al., 2022).

“*Operating cash flow refers to the cash flow that results from the firm’s day-to-day activities of producing and selling.*” yang berarti “ arus kas operasi mengacu pada arus kas yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan penjualan perusahaan sehari-hari” (Ross et al., 2021). Menurut IAI (2025) dalam PSAK 207 Laporan Arus Kas, “ arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

1. metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau
2. metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.”

“Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Dengan metode langsung,

informasi mengenai kelompok utama atas penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dapat ditentukan dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain, dan pos lain dimana kasnya berdampak pada arus kas investasi dan pendanaan” (IAI, 2025).

“*Operating cash flow is an important number because it tells us, on a very basic level, whether a firm’s cash inflows from its business operations are sufficient to cover its everyday cash outflows. For this reason, a negative operating cash flow is often a sign of trouble*”. Pernyataan ini berarti “ arus kas operasi merupakan angka yang penting karena hal ini menunjukkan, pada tingkat yang paling dasar, apakah arus kas masuk suatu perusahaan dari operasi bisnisnya cukup untuk menutupi arus kas keluar sehari-hari. Oleh karena itu, arus kas operasi yang negatif sering kali merupakan tanda adanya masalah” (Ross et al., 2021).

Menurut IAI dalam PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas (2025), “Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:”

1. “Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;”
2. “Penerimaan kas dari *royalty, fees*, komisi, dan pendapatan lain;”
3. “Penerimaan kas kepada pemasok barang dan jasa;”
4. “Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;”
5. “Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;”
6. “Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi; dan”
7. “Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan”.

“*Property, plant and equipment (PPE)* adalah aset dengan masa manfaat yang relatif panjang yang saat ini digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kategori ini mencakup tanah, bangunan, mesin dan peralatan, peralatan pengiriman, dan perabotan” (Weygandt et al., 2022).

Menurut IAI (2025) dalam PSAK 216 tentang Aset Tetap , “aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Berikut ini merupakan karakteristik utama yang dimiliki oleh *property, plant and equipment* (Kieso et al., 2020).

1. “Aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali”  
“Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai *property, plant and equipment*. Misalnya, bangunan yang tidak digunakan lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. *Property, plant and equipment* yang dimiliki untuk kemungkinan apresiasi harga diklasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, *property, plant and equipment* yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan diklasifikasikan secara terpisah dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Pengembang tanah atau subdivider mengklasifikasikan tanah sebagai inventaris”.
2. “Aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan”  
“*Property, plant and equipment* menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Pengecualiannya adalah tanah, yang disusutkan hanya jika terjadi penurunan nilai material, seperti hilangnya kesuburan tanah pertanian karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah”.
3. “Aset tersebut memiliki substansi fisik”  
“*Property, plant and equipment* adalah aset berwujud yang dicirikan oleh keberadaan atau substansi fisik. Hal ini membedakannya dari aset tak berwujud, seperti paten atau hak cipta. Namun, tidak seperti bahan mentah, *property, plant and equipment* tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang disimpan untuk dijual kembali”.

#### 2.1.4 Pengaruh *Free Cash Flow* terhadap Kebijakan Dividen

“*The amount of free cash flow provides creditors and shareholders with a picture of the company’s financial flexibility.*” yang berarti “besarnya arus kas bebas perusahaan memberikan gambaran kepada kreditor dan pemegang saham tentang fleksibilitas keuangan perusahaan.” (Kieso et al., 2020). “*Free cash flow* menunjukkan jumlah uang tunai dari operasi perusahaan yang dapat digunakan secara bebas oleh manajemen setelah pengeluaran modal yang diperlukan perusahaan untuk mempertahankan kapasitas produksinya. Arus kas bebas positif berarti masih tersedia kas dan manajemen dapat menggunakannya secara bebas karena kebutuhan investasi perusahaan telah terpenuhi, termasuk membayar dividen tunai kepada investor” (Fitri et al., 2024).

Hasil penelitian Sejati et al., (2020) menunjukkan bahwa “variabel *free cash flow* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kebijakan dividen. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki arus kas bebas tinggi lebih cenderung untuk membagikan dividen”. Hasil penelitian Fitri et al., (2024) juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sejati et al., (2020) yang menunjukkan “*free cash flow* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen”.

Tetapi hasil penelitian Putra (2022) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al., dan Sejati et al., “Hasil analisis menunjukkan bahwa *Free Cash Flow* tidak berdampak kepada kebijakan dividen. Tinggi rendahnya arus kas bebas tidak memberikan dampak kepada besar kecilnya pembagian dividen. Jika perusahaan menghendaki untuk memaksimalkan kekayaan pemilik saham dengan membayarkan dividen sedangkan kondisi arus kas bebas tidak memberikan kemungkinan, perusahaan bisa mempergunakan pendanaan dari luar perusahaan”. Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha1 : *Free cash flow* berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diprosikan dengan *dividend payout ratio*, dengan *firm size* sebagai variabel kontrol**

### 2.1.5 *Net Profit Margin*

*Net profit margin (NPM)* merupakan proksi dari rasio profitabilitas. “Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Pendapatan, atau kekurangannya, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dan ekuitas” (Weygandt et al., 2022). Berikut merupakan rasio profitabilitas menurut Weygandt et al. (2022):

1. *Profit Margin*  
“Mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang penjualan”.
2. *Asset Turnover*  
“Mengukur seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan penjualan”.
3. *Return on Asset*  
“Mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan”.
4. *Return on Ordinary Shareholders' Equity*  
“Mengukur profitabilitas investasi pemilik”.
5. *Earnings per Share (EPS)*  
“Mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa”.
6. *Price-Earnings Ratio*  
“Mengukur rasio harga pasar per saham terhadap laba per saham”.
7. *Payout Ratio*  
“Mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai”.

Menurut Gittman (2012) dalam Purba (2020), “*Net profit margin is measure the percentage of each sales dollar remaining after all costs and expenses, including interest, taxes, and preferred stock dividends, have been deducted*” yang berarti “*net profit margin* mengukur persentase dari setiap dolar penjualan yang tersisa setelah semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga, pajak, dan dividen saham preferen dipotong”. Selain itu, menurut Distian & Hermawan (2023) “*net profit margin* adalah salah satu rasio keuangan yang

digunakan untuk menghitung laba bersih perusahaan dari hasil aktivitas penjualan yang dihasilkan setiap bulan atau setiap tahun”. “Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Dari rasio ini bisa terlihat jelas perubahan laba perusahaan. Semakin baik nilai *net profit margin*, kecenderungan laba juga akan semakin naik” (Prasetyo & Petty Arisanti, 2021).

*“This profitability ratio does not, by itself, answer the question of how profitably a company uses its assets. But by relating the profit margin on sales to the asset turnover during a period of time, we can ascertain how profitably the company used assets during that period of time in a measure of the return on assets”*. Pernyataan ini berarti “rasio profitabilitas ini tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang seberapa menguntungkan suatu perusahaan menggunakan asetnya. Namun dengan menghubungkan margin keuntungan penjualan dengan perputaran aset selama suatu periode waktu, kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan aset selama periode waktu tersebut dalam mengukur laba atas aset” (Kieso et al., 2020).

Menurut Kurnia (2020), “perusahaan harus bisa memanfaatkan atau mengelola aset yang dimiliki dengan sebaik mungkin sehingga aset tersebut akan menghasilkan laba bagi perusahaan”. “Jika perusahaan memanfaatkan modal kerja yang baik maka akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan” (Astutisari et al., 2020). “Tingginya *NPM* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengelolaan biaya yang efisien dan dapat mengubah pendapatan menjadi laba bersih dengan baik. Sebaliknya, rendahnya *NPM* dapat mengindikasikan masalah dalam pengelolaan biaya atau pendapatan yang tidak cukup optimal” (Harianti et al., 2025). Menurut Weygandt et al. (2022) berikut merupakan rumus dari *Net Profit Margin* (NPM):

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

*NPM* : *Net Profit Margin*

*Net Income* : Laba bersih tahun berjalan

*Net Sales* : Penjualan bersih

Menurut Weygandt et al. (2022), “*the income statement reports the success or profitability of the company’s operations over a specific period of time. The income statement lists revenues first, followed by expenses. When revenues exceed expenses, net income results.*” yang memiliki arti “laporan laba rugi melaporkan keberhasilan atau profitabilitas operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi mencantumkan pendapatan terlebih dahulu, diikuti dengan biaya. Ketika pendapatan melebihi pengeluaran, maka timbullah *net income*”. “*Income statement does not include investment and dividend transactions between the shareholders and the business in measuring net income.*” yang berarti “laporan laba rugi tidak memasukkan transaksi investasi dan dividen antara pemegang saham dan bisnis dalam mengukur laba bersih” (Weygandt et al., 2022). Berikut ini adalah tabel perhitungan *net income* menurut Kieso et al. (2020).

Tabel 2.1 Perhitungan *Net Income*

Net sales		XXX
(-/-) Cost of Goods Sold		XXX
<b>Gross Profit</b>		<b>XXX</b>
<b>Expenses:</b>		
(-/-) Selling expenses	XXX	
(-/-) Administrative expenses	XXX	XXX
(+/-) Other income and expenses		XXX
<b>Income from operations</b>		<b>XXX</b>
(-/-) Financing cost		XXX
<b>Income before taxes</b>		<b>XXX</b>
(-/-) Income tax		XXX
<b>Income from continuing operations</b>		<b>XXX</b>
<b>Discontinued operations:</b>		
(+/+) Income from operations	XXX	
(-/-) Loss on disposal	XXX	XXX
<b>Net income</b>		<b>XXX</b>

Sumber: Kieso et al., (2020)

Selain itu menurut Kieso et al. (2020), “komponen untuk menghitung *net income* adalah:”

1. *Sales revenue*. Menyajikan penjualan, diskon, potongan, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah bersih pendapatan penjualan.
2. *Cost of goods sold (COGS)*. Menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan.
3. *Gross profit*. Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan.
4. *Selling expenses*. Melaporkan beban yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan.
5. *Administrative or general expenses*. Melaporkan beban administrasi umum.
6. *Other income and expense*. Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang diberikan di atas. Item seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan di bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan.
7. *Income from operations*. Hasil perusahaan dari operasi normal.
8. *Financing cost*. Pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga.
9. *Income before tax expense*. Total pendapatan sebelum pajak penghasilan.
10. *Income tax*. Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas pendapatan sebelum pajak penghasilan.
11. *Income from continuing operations*. Hasil perusahaan sebelum laba atau rugi atas operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki laba atau rugi atas operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih.
12. *Discontinued operations*. Laba atau rugi yang timbul dari pelepasan komponen perusahaan.
13. *Net income*. Hasil bersih dari kinerja perusahaan selama suatu periode waktu.

Berikut ini adalah tabel perhitungan *net sales* beserta penjelasan masing-masing komponen perhitungan *net sales* menurut Weygandt et al., (2022):

Tabel 2.2 Perhitungan *Net Sales*

<b>Sales</b>		
Sales revenue		XXX
(-/-) Sales discounts	XXX	
(-/-) Sales return and allowances	XXX	XXX
<b>Net Sales</b>		<b>XXX</b>

Sumber: Weygandt et al. (2022)

1. *Sales Revenue*

“Sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, perusahaan mencatat pendapatan penjualan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Biasanya, kewajiban pelaksanaan dipenuhi ketika barang berpindah dari penjual ke pembeli. Pada titik ini, transaksi penjualan selesai dan harga jual ditetapkan”.

2. *Sales Return and Allowances*

“*Sales return and allowances* merupakan kondisi ketika penjual menerima barang kembali dari pembeli (pengembalian) atau memberikan pengurangan harga pembelian (kelonggaran) sehingga pembeli akan menyimpan barang tersebut”. *Sales return* berarti pembeli mengembalikan barang dan dana sedangkan *sales allowance* berarti pembeli menerima pengurangan harga tanpa adanya pengembalian barang dagang.

3. *Sales Discounts*

“Diskon penjualan didasarkan pada harga faktur dikurangi pengembalian dan potongan. Diskon Penjualan merupakan akun kontra pendapatan terhadap Pendapatan Penjualan. Saldo normalnya adalah debit”.

**2.1.6 Pengaruh *Net Profit Margin* terhadap Kebijakan Dividen**

“Tinggi rendahnya *NPM* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan meminimalisir biaya-biaya. Melalui rasio *NPM* ini seorang investor cenderung lebih memilih saham dengan *NPM* yang tinggi karena mampu menghasilkan *return* yang tinggi pula” (Ningsih et al., 2021).

Menurut Astuti (2020) “semakin tinggi *net profit margin* semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yang mengindikasikan kemampuan dalam membayar dividen juga semakin tinggi”.

Hasil penelitian Ningsih et al., (2021) menyatakan bahwa “*net profit margin* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *dividend payout ratio* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT. BEI periode 2013-2017”. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa “*net profit margin* memberikan dampak signifikan terhadap *dividend payout ratio*. Semakin besar skala *net profit margin* menandakan baiknya kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Implementasi ini menandakan ketika *net profit margin* bertambah maka *dividend payout ratio* akan meningkat sehingga ketika *net profit margin* perusahaan semakin stabil maka hal tersebut dapat menguntungkan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan seperti investor” (Br Purba & Yusran, 2020).

Tetapi dalam hasil penelitian Nugraha et al. (2021) menyatakan bahwa “*Net Profit Margin (NPM)* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini terjadi karena peningkatan dari penjualan yang disertai dengan peningkatan laba belum tentu dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen melainkan adanya laba ditahan untuk keperluan pendanaan internal perusahaan.” Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : *Net profit margin* berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan *dividend payout ratio*, dengan *firm size* sebagai variabel kontrol**

### **2.1.7 Cash Ratio**

*Cash ratio (CR)* merupakan proksi dari rasio likuiditas. “*Liquidity ratios measure the short-term ability of the company to pay its maturing obligations and to meet unexpected needs for cash. Short-term creditors such as bankers and suppliers are particularly interested in assessing liquidity.*” yang berarti “Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk

membayar kewajibannya yang jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Kreditor jangka pendek seperti bankir dan *supplier* sangat tertarik untuk menilai likuiditas” (Weygandt et al., 2022). Menurut Ross et al., (2021) “semakin likuid suatu bisnis, semakin kecil kemungkinannya mengalami kesulitan keuangan (yaitu, kesulitan membayar utang atau membeli aset yang dibutuhkan)”.

“Untuk memastikan pembayaran dividen manajer perlu memastikan serta memikirkan sebagian aspek yang terdapat di perusahaan, salah satunya rasio kas dipergunakan untuk mengetahui seberapa banyak uang kas dan setara kas yang ada sehingga dapat dialokasikan untuk membayar utang dalam kurun waktu yang pendek” (Liviana et al., 2022). Menurut Tamplin (2022), “*cash ratio* (juga dikenal sebagai rasio cakupan kas) adalah ukuran seberapa baik perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya dalam bentuk kas dan setara kas (item investasi yang segera tersedia untuk diubah menjadi uang tunai, misalnya surat utang negara dan obligasi pemerintah jangka pendek). Rasio ini berguna bagi kreditor untuk memutuskan berapa banyak uang yang dapat mereka pinjamkan kepada suatu perusahaan.”

Menurut N. A. Nasution & Oktari (2021), “pihak manajemen harus mampu memanfaatkan arus kas sebaik-baiknya agar arus kas dapat dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban perusahaan. Peningkatan maupun penurunan arus kas diakibatkan tingkat laba yang diperoleh pihak manajemen dipergunakan untuk membayar hutang lancar”. “Tinggi rendahnya *cash ratio* disebabkan oleh jumlah kas dan setara kas serta jumlah kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan” (Tamplin, 2022). “Rasio kas tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendek karena besarnya kas yang tersedia tidak dapat menutupi kewajiban yang ada. Akibatnya, nilai *cash ratio* menjadi rendah, sehingga perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan kas dan setara kasnya” (Liviana et al., 2022). Menurut Febriana et al., (2021) *cash ratio* dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Cash \& Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

*CR* : *Cash Ratio*

*Cash & Cash Equivalent* : Kas dan setara kas

*Current Liabilities* : Kewajiban jangka pendek perusahaan

Tamplin (2022) menyatakan bahwa “biasanya perusahaan yang sehat mempunyai rasio kas sebesar 0,5 atau lebih. Di bawah angka tersebut, dapat diduga perusahaan tidak memanfaatkan asetnya dengan baik. Sebaliknya jika suatu perusahaan mempunyai rasio kas lebih dari 1 berarti mampu melunasi utangnya dengan mudah dan tetap memiliki sisa aset likuid”. Menurut Mustika & Apriliani (2022), “Jika rasionya 1 kali atau antara kas dan utang lancar sama besarnya, maka itu artinya perusahaan tersebut mampu membayar dengan baik utang jangka pendeknya”.

Menurut IAI (2022) dalam PSAK 207 Laporan Arus Kas, “kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*)” dan “setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan”. Selain itu, “banyak perusahaan menggunakan sebutan “kas dan setara kas” dalam pelaporan kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi sejumlah uang tunai dan sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga” (Weygandt et al., 2022). “Contoh setara kas adalah obligasi pemerintah, surat berharga komersial, dan dana pasar uang tertentu” (Kieso et al., 2020).

Menurut Weygandt et al. (2022) “*current liabilities* merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam waktu satu tahun atau siklus operasi. Berikut ini merupakan contoh dari *current liabilities*”.

#### 1. *Notes payable*

“Perusahaan mencatat kewajiban dalam bentuk nota tertulis sebagai wesel bayar. Wesel bayar sering digunakan sebagai ganti utang usaha karena wesel bayar memberikan bukti formal kepada pemberi pinjaman atas

kewajiban tersebut jika diperlukan upaya hukum untuk menagih utang. *Notes payable* diterbitkan untuk jangka waktu yang berbeda-beda. *Notes payable* yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak tanggal laporan posisi keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar”.

2. *Accounts payable*

“Utang usaha, atau utang dagang, adalah saldo yang harus dibayar kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli secara kredit” (Kieso et al., 2020).

3. *Unearned revenue*

“Ketika sebuah perusahaan menerima pembayaran di muka, ia mendebit Kas dan mengkredit akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum diperoleh”.

4. *Salaries and wages payable*

“Perusahaan melaporkan sebagai kewajiban lancar sejumlah uang yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi”.

5. *Income tax payable*

“*Income tax payable* merupakan utang pajak penghasilan yang belum dibayarkan oleh perusahaan”.

Menurut IAI (2025) dalam PSAK 201 Laporan Keuangan, “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan

instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut”.

### **2.1.8 Pengaruh *Cash Ratio* terhadap Kebijakan Dividen**

Menurut Fitriana & Febrianto (2021), “*cash ratio* yang semakin tinggi maka semakin baik kondisi keuangan jangka pendek dan sebaliknya. Pembayaran dividen merupakan arus kas keluar, sehingga semakin kuat kas yang tersedia pada perusahaan maka akan semakin besar kemampuan perusahaan membayarkan dividen”. “Semakin likuid sebuah perusahaan, kemungkinan pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin besar” (Ginting et al., 2020). “Semakin tinggi *cash ratio* yang dimiliki perusahaan maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin besar dilihat dari kas dan setara kas yang dimiliki. Sehingga semakin kuat posisi *cash ratio* yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membayar dividen” (Wulansari et al., 2020).

Hasil penelitian Wulansari et al., (2020) menunjukkan bahwa “*cash ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *dividend payout ratio*. Ini berarti besar kecilnya *cash ratio* akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah dividen yang akan dibagikan perusahaan”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Febrianto (2021), “menunjukkan bahwa *CR* berpengaruh signifikan terhadap *DPR*. Semakin nilai *CR* suatu perusahaan, pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar. Meningkatnya nilai *CR* dapat meningkatkan keinginan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen”.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Umar et al. (2022) menyatakan bahwa “secara parsial *cash ratio* berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen (*DPR*). Hal ini dapat diartikan bahwa *cash ratio* mempengaruhi kemampuan perusahaan logistik dalam memaksimalkan kebijakan dividen. Pengaruh *cash ratio* terhadap *cash dividend* dapat dikarenakan perusahaan dalam menentukan besarnya *cash dividend* yang

dibayarkan tidak hanya memperhatikan posisi *cash ratio* saja tetapi juga memperhatikan lingkungan eksternal perusahaan, khususnya pesaing”. Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> : *Cash ratio* berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan *dividend payout ratio*, dengan *firm size* sebagai variabel kontrol**

### **2.1.9 *Debt to Equity Ratio***

*Debt to equity ratio* merupakan proksi dari rasio *leverage* dari struktur modal. “Struktur modal hanyalah gabungan dari utang jangka panjang dan sekuritas ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya, namun yang menentukan gabungan tersebut bukanlah hal yang mendasar” (Zutter & Smart, 2021). “Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik akan berakibat perusahaan mempunyai utang yang sangat besar sehingga dapat memberikan beban yang sangat berat bagi perusahaan dan tentu dapat meningkatkan risiko kebangkrutan bagi perusahaan tersebut” (Y. A. Nasution, 2020).

Menurut Zutter & Smart (2021), “*leverage* keuangan mengacu pada dana pinjaman, seperti pinjaman bank atau obligasi, yang membebankan biaya keuangan tetap pada perusahaan. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan hutang (yaitu, *leverage* keuangan) adalah perusahaan dengan *leverage*, sedangkan perusahaan yang hanya mengandalkan ekuitas untuk membiayai aktivitasnya adalah perusahaan tanpa *leverage*. Istilah *leverage* menyiratkan bahwa pembiayaan hutang memperbesar kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa cara. Bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika meminjam uang, efek *leverage* bisa positif atau negatif.”

Menurut Zutter & Smart (2021), “terdapat 2 ukuran *leverage* secara umum, yaitu:

1. *Degree of in-debtedness*

“*Degree of in-debtedness* mengukur jumlah utang relatif terhadap jumlah neraca signifikan lainnya. Dua ukuran umum *Degree of in-debtedness* adalah *debt ratio* dan *debt to equity ratio*”.

2. *The ability to repay debts*

“*The ability to repay debts* berfokus pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Rasio ini membandingkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan pembayaran tetap (untuk utang dan kewajiban seperti sewa) yang wajib dilakukan.”

Menurut Zutter & Smart (2021), “*The debt-to-equity ratio measures the relative proportion of total liabilities to common stock equity used to finance the firm’s assets. As with the debt ratio, a higher debt-to-equity ratio means that the firm uses more financial leverage.*” yang berarti “*Debt-to-equity ratio* mengukur proporsi relatif total kewajiban terhadap ekuitas saham biasa yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Seperti halnya *debt ratio*, *debt-to-equity ratio* yang lebih tinggi berarti perusahaan menggunakan lebih banyak *leverage* keuangan”. “*Debt to equity ratio* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan didanai oleh hutang atau modal yang dimiliki perusahaan. Jika nilai *debt to equity ratio* tinggi, hal ini berarti bahwa perusahaan dibiayai oleh kreditor (pemberi hutang) dan bukan dari sumber keuangannya sendiri (investor)” (Wulansari et al., 2020). “Semakin rendah nilai *debt to total equity ratio* mengartikan proporsi kewajiban perusahaan semakin kecil jika dibandingkan dengan ekuitas perusahaan tersebut” (Fernandes & Diana, 2020). Maulana et al. (2022) menyatakan bahwa “jika penggunaan utang yang menurun maka rasio hutang pun akan ikut menurun yang mengakibatkan *DER* pun menurun”. Berikut merupakan rumus *debt to equity ratio* menurut Ross et al (2021):

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

*DER* : *Debt to Equity Ratio*

*Total Debt* : Total Utang

*Total Equity* : Total Ekuitas

Menurut IAI (2025) dalam PSAK 237 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik”. Menurut Weygandt et al. (2022), “kewajiban adalah klaim atas aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada. Bisnis dari semua ukuran biasanya meminjam uang dan membeli barang dagangan secara kredit”. “Suatu liabilitas memiliki tiga karakteristik penting” (Kieso et al., 2020):

1. “merupakan kewajiban saat ini”.
2. “memerlukan transfer sumber daya ekonomi (uang tunai, barang, jasa)”.
3. “timbul dari peristiwa masa lalu”.

Menurut Kieso et al. (2020) “pembagian dasar kewajiban menjadi”:

#### 1. *Current Liabilities*

“*Current liabilities* dilaporkan jika terdapat salah satu dari dua kondisi berikut”:

- a. “Kewajiban tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya; atau”
- b. “Kewajiban ini diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan”.

“Contoh dari *current liabilities*, yaitu utang usaha, utang wesel, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang jangka pendek yang diperkirakan akan dibiayai kembali, utang dividen, uang muka dan simpanan pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang pajak penjualan dan pertambahan nilai, utang pajak penghasilan, utang terkait karyawan”.

#### 2. *Non-Current Liabilities*

“*Non-current liabilities* merupakan kewajiban yang diekspektasikan untuk dibayar perusahaan dalam periode lebih dari 1 tahun kedepan.

Contoh dari *non-current liabilities*, yaitu *bonds payable*, *long-term notes*, atau *lease obligations*”

Menurut Kieso et al. (2020), “Ekuitas adalah sisa hak atas kekayaan perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas sering kali disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut:”

1. *Share Capital*

“*Share capital* merupakan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dalam saham yang diterbitkan. *Share capital* termasuk:”

a. *Ordinary Shares*

“Saham biasa mewakili sisa kepentingan perusahaan yang menanggung risiko kerugian utama dan menerima manfaat kesuksesan”.

b. *Preference Shares*

“Saham preferen adalah kelas saham khusus yang mempunyai preferensi atau ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa”.

2. *Share Premium*

“*Share premium* merupakan kelebihan dari jumlah yang dibayarkan di atas nilai par atau nilai yang dinyatakan”.

3. *Retained Earnings*

“*Retained Earnings* merupakan laba perusahaan yang tidak dibagikan”.

4. *Accumulated Other Comprehensive Income*

“*Accumulated Other Comprehensive Income* merupakan jumlah agregat dari pos penghasilan komprehensif lain”.

5. *Treasury Shares*

“*Treasury shares* merupakan jumlah saham biasa yang dibeli kembali”.

6. *Non-Controlling Interest*

“*Non-Controlling Interest* merupakan bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

#### 2.1.10 Pengaruh *Debt to Equity* terhadap Kebijakan Dividen

“Semakin tinggi tingkat *DER* mengakibatkan menurunnya kemampuan kas perusahaan untuk membayar dividen karena kas yang ada digunakan untuk membayar hutang-hutang tersebut, begitu juga sebaliknya” (Fitriana & Febrianto, 2021). “Semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya. Semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan semakin besar komposisi utang dalam struktur modal perusahaan yang mengakibatkan semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Besaran utang yang dimiliki perusahaan, akan mempengaruhi dividen yang akan dibagikan” (Husin et al., 2025).

“Apabila manajemen memandang bahwa perusahaan telah memiliki *financial leverage* yang tidak menguntungkan, maka perusahaan akan menahan pembayaran dividen untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Dengan mengurangi jumlah dividen yang dibagikan maka ekuitas perusahaan akan meningkat, sehingga memperbesar proporsi ekuitas dibanding kewajiban yang dimiliki perusahaan” Santoso (2008) dalam (Andre, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulansari et al. (2020) “menunjukkan *debt to equity ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *dividend payout ratio*”. Hasil penelitian Fitriana & Febrianto (2021) dapat “disimpulkan bahwa *DPR* dapat dipengaruhi secara signifikan oleh *DER*. Tingkat *DER* yang semakin tinggi mengakibatkan menurunnya kemampuan kas perusahaan untuk membayar dividen karena kas yang ada digunakan untuk membayar hutang - hutang tersebut, begitu juga sebaliknya”. Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**Ha4 : *Debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang diprosikan dengan *dividend payout ratio*, dengan *firm size* sebagai variabel kontrol**

### **2.1.11 Pengaruh *Free Cash Flow*, *Net Profit Margin*, *Cash Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan terhadap Kebijakan Dividen**

Hasil penelitian Ginting et al. (2020) “menunjukkan secara simultan Profitabilitas (*Net Profit Margin*), Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), *Leverage* (*Debt to Equity Ratio*), dan Likuiditas (*Cash Ratio*) berpengaruh dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Br Purba & Yusran (2020), “*free cash flow* dan *net profit margin* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *dividend payout ratio*”. Sedangkan dalam penelitian Nugraha et al. (2021) menunjukkan hasil “*Debt to Equity Ratio* (*DER*), *Return on Equity* (*ROE*), dan *Net Profit Margin* (*NPM*) berpengaruh secara simultan terhadap *Dividend Payout Ratio* (*DPR*)”. Berdasarkan hasil penelitian dari Fitriana & Febrianto (2021) menunjukkan bahwa “secara simultan variabel *CR* (*Cash Ratio*) dan *DER* (*Debt to Equity Ratio*) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap *DPR* (*Dividend Payout Ratio*)”.

### **2.1.12 *Firm Size***

Menurut Rahmawati et al., (2021), “ukuran perusahaan adalah seberapa besar ataupun kecil yang dapat menggolongkan suatu perusahaan ke dalam kelompok baik besar maupun kecil bersumber pada pengukurannya menggunakan total aset”. Menurut M. N. Nainggolan et al., (2022), “pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*)”. “Besarnya kecilnya suatu usaha dapat dinilai dari jumlah total aset yang dimilikinya” (Fillio & Diana, 2024). Berdasarkan POJK (2017) Nomor 53 /POJK. 04/ 2017 Pasal 1, terdapat 3 macam ukuran perusahaan, yaitu:

1. “Emiten dengan aset skala kecil yang disebut sebagai Emiten Skala Kecil memiliki total aset yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

2. “Emiten dengan aset skala menengah yang disebut sebagai Emiten Skala Menengah memiliki total aset yang setara, lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”
3. “Emiten dengan aset skala besar yang disebut sebagai Emiten Skala Besar memiliki total aset yang setara, lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

Berikut merupakan rumus *firm size* menurut Rahmawati et al., (2021).

$$FS = Ln (Total Assets) \quad (2.8)$$

Keterangan:

*FS* : *Firm Size*

*Ln* : Logaritma natural

*Total Asset* : Jumlah total aset yang dimiliki perusahaan

“Aset disebut sebagai harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas pada entitas” (Febriana et al., 2021). Menurut Weygandt et al. (2022) “aset dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu”:

#### 1. *Intangible Asset*

“*Intangible asset* adalah aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik namun sering kali sangat berharga”. “*Intangible asset* memiliki tiga karakteristik utama yaitu dapat diidentifikasi, tidak memiliki bentuk fisik, dan bukan merupakan aset keuangan” (Kieso et al., 2020). Contoh *intangible asset* adalah *goodwill*, *patents*, *copyright*, dan *trademarks*.

#### 2. *Property, Plant, and Equipment (PPE)*

“*PPE* adalah aset dengan masa manfaat yang relatif panjang yang saat ini digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Contoh *PPE* adalah

tanah, bangunan, mesin, dan peralatan”.

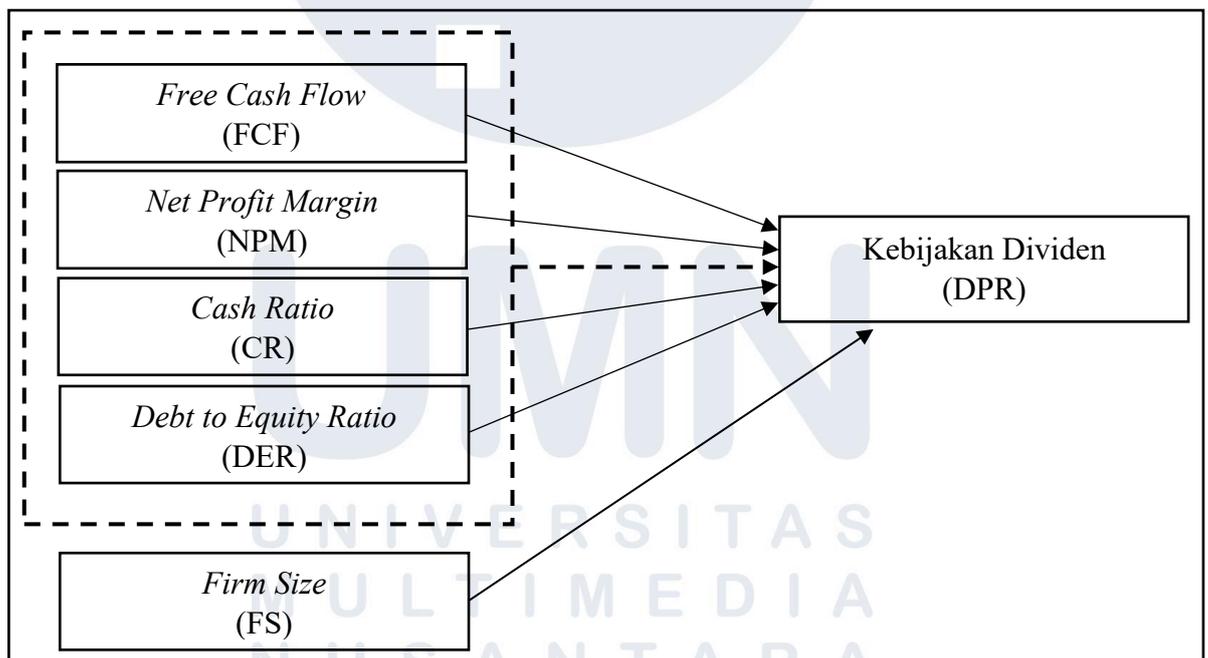
### 3. *Long-Term Investments*

“*Long-Term Investments* adalah investasi pada saham biasa dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dimiliki selama bertahun-tahun, dan aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan dalam aktivitas operasinya”.

### 4. *Current Assets*

“*Current Assets* adalah aset yang perusahaan harapkan untuk diubah menjadi kas atau digunakan dalam satu tahun atau siklus operasinya. Contoh *current asset* adalah *cash, recivables, inventory, prepaid expenses, dan short-term investment*”.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran